

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

## Menggali Potensi Keberhasilan Program Transmigrasi: Pendekatan Pemetaan Karakteristik Sosial Ekonomi Calon Transmigran Asal Provinsi Jawa Timur

**Slamet Hari Sutanto<sup>a</sup>**

<sup>a</sup>Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur  
e-mail : [slametharisutanto@gmail.com](mailto:slametharisutanto@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi keberhasilan transmigrasi melalui pemetaan karakteristik sosial ekonomi calon transmigran di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Pacitan dan Lumajang sebagai lokus penelitian. Penelitian ini fokus pada aspek sosial ekonomi, budaya, motivasi, dan latar belakang calon transmigran, dengan data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan kualifikasi teknis calon transmigran dalam keterampilan pertanian dan prospek bisnis masih rendah. Data dan informasi calon transmigran perlu ditingkatkan, terutama integrasi profil sosial ekonomi tingkat desa dengan data kemiskinan baik dari Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah. Ketidakmampuan calon transmigran memahami program, tujuan, dan peluang usaha di daerah tujuan menjadi faktor penurunan potensi keberhasilan transmigrasi. Disarankan untuk melakukan sosialisasi intensif mengenai persyaratan, jenis transmigrasi, pendaftaran, hak, kewajiban, dan prospek usaha pada lokasi tujuan transmigrasi. Selain itu, perlu dirumuskan sistem pengelompokan kawasan transmigran potensial untuk membantu pemerintah menentukan kawasan transmigran yang tepat. Informasi dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan penting dalam proses perencanaan, perbaikan metode seleksi, dan pelaksanaan transmigrasi di Jawa Timur.

**Kata Kunci:** Pemetaan Karakteristik Sosial Ekonomi, Program Transmigrasi, Jawa Timur.

## *Exploring the Potential Success of Transmigration Programs: Socio-Economic Characteristics Mapping Approach for Prospective Transmigrants from East Java Province*

### *Abstract*

*This study aims to explore the potential for transmigration success through mapping the socio-economic characteristics of prospective transmigrants in East Java, especially in Pacitan and Lumajang Regencies as research locus. The study focuses on socioeconomic, cultural, motivational, and background aspects of prospective transmigrants, with data collected through questionnaires and in-depth interviews. The results of the study show that the technical qualifications of prospective transmigrants in agricultural skills and business prospects are still low. Data and information on prospective transmigrants need to be improved, especially the integration of socio-economic profiles at the village level with poverty data from both the Ministry of Social Affairs and Local Government. The inability of prospective transmigrants to understand the programs, goals, and business opportunities in the destination area is a factor in decreasing the potential for transmigration success. It is recommended to conduct intensive socialization regarding the requirements, types of transmigration, registration, rights, obligations, and business prospects at the transmigration destination location. In addition, it is necessary to formulate a system of grouping potential transmigrant areas to help the government determine the right transmigrant areas. The information from this study is expected to be an important input in the planning process, improvement of selection methods, and implementation of transmigration in East Java.*

**Keywords:** Mapping Socioeconomic Characteristics, Transmigrasion Program, East Java.

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

## A. PENDAHULUAN

Program transmigrasi telah berperan penting dalam pembangunan nasional dengan memberikan pekerjaan bagi petani miskin yang tidak memiliki lahan, mendukung perluasan areal tanaman pangan, menciptakan pusat pertumbuhan regional, serta mengubah pola demografi (Warganegara & Waley, 2022). Program ini juga terbukti berkontribusi pada ketahanan dan persatuan nasional, pengawasan daerah terpencil, serta mengatasi kesenjangan distribusi penduduk antara Jawa dan luar Jawa.

Jawa Timur, dengan penduduk 40,67 juta jiwa dan luas wilayah 47,8 ribu km<sup>2</sup>, merupakan provinsi terpadat kedua di Indonesia setelah Jawa Barat, memiliki kepadatan 851 jiwa per km<sup>2</sup>. Tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 14,43%, sementara di perkotaan 6,84%, hal ini menunjukkan disparitas signifikan (Potter, 2012).

Meskipun berbagai program pengurangan kemiskinan telah diterapkan, akan tetapi keberhasilannya terbatas karena fokus pada bantuan sosial malah menyebabkan ketergantungan dan hanya memberikan perubahan ekonomi yang minimal. Program pengentasan kemiskinan seharusnya mempromosikan ekonomi produktif dan kemandirian. Transmigrasi terbukti relatif efektif dalam mengurangi kepadatan penduduk dan kemiskinan melalui redistribusi aset (Delam, 2011).

Pada saat ini paradigma program transmigrasi telah bergeser dari sekadar relokasi penduduk miskin menuju pengembangan wilayah transmigrasi (Muksin, 2023). Berbeda dengan konsep lama yang menstigmatisasi transmigran sebagai individu tidak terampil dan miskin, yang dianggap kurang pendidikan dan tidak sesuai untuk sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, paradigma baru ini berupaya menghindari siklus kemiskinan dan masalah sosial ekonomi yang timbul akibat daya saing yang rendah (Pargito, 2020).

Dengan demikian Perlu penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan transmigrasi di era desentralisasi pasca reformasi (Gede & Ketut, 2013). Program transmigrasi membuka akses bagi keluarga miskin terhadap pekerjaan dengan upah layak atau wirausaha (Najiyati & Susilo, 2011; Saksono, 2011). Calon transmigran, yang umumnya kurang mampu secara ekonomi dan bergantung pada lahan pertanian terbatas, dapat memperoleh lahan budidaya, perumahan, fasilitas, peralatan, konseling, dan biaya hidup melalui program ini, sehingga memungkinkan sumber pendapatan berkelanjutan (Sutanto et al., 2019; Keyfitz & Nitisastro, 1964).

Minat masyarakat Jawa Timur terhadap transmigrasi sangat tinggi. Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2021, terdapat 558 rumah tangga (KK) yang mendaftar untuk program transmigrasi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Transmigrasi dan Pemukiman Kembali Perdesaan (Dirjen PPKTrans), selama tiga tahun terakhir (2019, 2020, dan 2021), Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi penempatan untuk 160 rumah tangga (KK). Rumah tangga ini dialokasikan ke enam kabupaten di lima provinsi di seluruh Indonesia. Menurut keputusan Direktur Jenderal Direktorat Penyiapan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2021, Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi 109 rumah tangga (KK) pada tahun 2021. Rumah tangga ini dialokasikan di enam provinsi: Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

Sedangkan pada tahun 2022, Jawa Timur mendapatkan kuota untuk 63 rumah tangga (KK) yang akan ditransmigrasikan ke Sulawesi. Rinciannya adalah sebagai berikut: 10 KK ke UPT Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; 7 KK ke UPT Lemban Tongoa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah; 11 KK ke UPT Raimuna di Kabupaten Muna dan 10 KK ke UPT Watutinawu di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara; 10 KK ke UPT Saluandeang dan 15 KK ke UPT

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Salusisu di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun minat masyarakat terhadap transmigrasi tinggi, kapasitas pemerintah dalam mengakomodasi minat tersebut masih terbatas, terutama terlihat dari disparitas antara alokasi anggaran yang tersedia dan tingginya permintaan untuk program transmigrasi (Chotib, 2011; Dewi, 2013). Meskipun demikian, pemerintah kabupaten dan kota menunjukkan tingkat perhatian yang tinggi terhadap program ini, terbukti dengan kerjasama yang aktif antara pemerintah daerah asal Jawa Timur dengan daerah tujuan transmigrasi. Informasi publik terkait transmigrasi saat ini masih terbatas, memungkinkan partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk yang tidak sepenuhnya membutuhkan transmigrasi (Hardiyanti et al., 2018). Secara bersamaan, pemerintah juga dituntut untuk menghitung potensi calon transmigran ke daerah-daerah yang memiliki kesesuaian dengan karakteristik transmigran (Dewi, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah provinsi Jawa Timur dalam perencanaan, penyempurnaan metode seleksi, dan pelatihan dalam pelaksanaan program transmigrasi. Fokusnya adalah mengidentifikasi karakteristik calon transmigran yang sesuai, untuk memudahkan pemerintah menargetkan program ini kepada populasi yang tepat dan daerah yang memiliki potensi untuk penerima program transmigrasi.

## B. PEMBAHASAN

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi program transmigrasi oleh pemerintah kabupaten/kota menghadapi permasalahan terkait regulasi baru yang memindahkan kewenangan program transmigrasi dari tingkat daerah ke pemerintah pusat. Hal ini menyulitkan dinas yang bertanggung jawab di tingkat kabupaten/kota dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan transmigrasi. Hambatan utama dalam pendaftaran dan keberangkatan calon transmigran adalah

lamanya proses pemberangkatan. Meskipun secara teoritis jumlah calon transmigran yang mencukupi ada, proses administratif yang berbelarut-larut dan ketidakpastian jadwal keberangkatan dari pemerintah mengakibatkan persiapan calon transmigran kurang optimal (Suharso & Dalijo, 1981).

Selain itu, keputusan untuk melakukan transmigrasi tidak hanya bergantung pada kepala keluarga tetapi juga dipengaruhi oleh dorongan dari anggota keluarga lainnya, seperti istri dan anak yang sudah dewasa. Peran orang tua juga mempengaruhi keputusan calon transmigran, dimana orang tua sering kali mempertimbangkan kesulitan ditinggalkan oleh anak perempuan dan dampaknya terhadap keluarga muda lainnya.

Masalah lainnya adalah status pekerjaan calon transmigran yang tidak semuanya merupakan petani tulen. Penelitian menunjukkan bahwa banyak calon transmigran yang merupakan petani tanpa lahan, penyewa lahan kecil, atau bahkan buruh harian, dengan pengetahuan dan keterampilan bertani yang masih terbatas. Hal ini menjadi kendala dalam implementasi program transmigrasi, mengingat pertanian merupakan aspek kunci dari program ini (Burbridge et al., 1981).

Berikut hasil analisis penelitian terhadap potensi calon transmigran dari beberapa aspek yang telah disusun dalam kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :

### 1. Karakteristik Demografis Calon Transmigran

Studi ini mengkaji aspek demografi pada calon transmigran, terutama terkait usia, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, dan tanggungan ekonomi. Usia menjadi faktor krusial dalam penilaian karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas calon transmigran di lokasi tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas calon transmigran di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lumajang berusia antara 30 hingga 49 tahun, sesuai dengan batas maksimal usia 49 tahun yang ditetapkan. Meskipun ada penyesuaian usia sesuai persetujuan dari daerah asal, umumnya calon

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

transmigran memenuhi kriteria kepala keluarga yang masih relatif muda dan produktif, sesuai dengan keinginan pemerintah untuk memperoleh tenaga kerja yang dapat berkontribusi maksimal di lokasi transmigrasi.

Selain usia, jumlah anggota keluarga juga menjadi pertimbangan penting dalam seleksi calon transmigran. Banyak dari transmigran memiliki lebih dari tiga anak, yang dapat meningkatkan beban tanggungan di tempat baru. Meskipun demikian, keberadaan anggota keluarga tambahan juga dapat memberikan tambahan tenaga kerja untuk mengelola usaha baru di sektor pertanian yang padat karya. Meskipun demikian, aspek ekonomi dari beban tanggungan keluarga perlu diperhatikan secara serius untuk memastikan adaptasi yang lancar dan keberlanjutan program transmigrasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti kompleksitas aspek demografi dalam konteks seleksi calon transmigran. Selain faktor usia dan jumlah anggota keluarga, penting juga untuk mempertimbangkan peran dan dampak ekonomi dari keputusan untuk bertransmigrasi, termasuk bagaimana dinamika keluarga dapat mempengaruhi kesuksesan dan keberlanjutan program transmigrasi.

## 2. Karakteristik Sosial Ekonomi Calon Transmigran

Dalam proses seleksi calon transmigran, analisis sosial ekonomi mempertimbangkan beberapa faktor kunci seperti pendidikan, keterampilan, suku, dan agama. Data dari kedua kabupaten yang diteliti menunjukkan bahwa mayoritas calon transmigran adalah petani, meskipun perlu dibedakan antara transmigran yang memiliki lahan dan yang tidak. Sebagian besar calon transmigran dianggap sebagai petani tanpa lahan, terutama karena memiliki area pekarangan yang terbatas di sekitar rumah transmigran, dan sebagian besar dari transmigran tidak terlibat dalam kegiatan pertanian yang signifikan (Susilowati, 2016).

Perubahan ekonomi di masyarakat pedesaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi pekerjaan calon transmigran di luar sektor pertanian. Kondisi seperti kepemilikan lahan yang terbatas dan pendapatan yang tidak stabil berkontribusi pada situasi ini, di mana banyak calon transmigran dari pedesaan mengidentifikasi diri transmigran sebagai petani meskipun transmigran bekerja sebagai pedagang, tukang, atau buruh. Transmigrasi menawarkan kesempatan untuk memiliki lahan sebagai faktor produksi yang dapat meningkatkan status sosial, meskipun pemerintah lebih berhasil menarik buruh harian daripada petani berpengalaman sesuai dengan preferensi karakteristik calon transmigran yang diinginkan (Knight, 1994).

Karakteristik ideal calon transmigran yang diinginkan pemerintah termasuk memiliki pengalaman sebagai pemilik atau penyewa lahan pertanian seluas 0,5 hingga 1 hektar. Namun, mayoritas calon transmigran yang mendaftar cenderung tidak memenuhi kriteria ini, lebih sering merupakan petani tanpa lahan yang mengandalkan pekerjaan harian untuk mencukupi kebutuhan hidup transmigran. Meskipun transmigran mungkin tidak memiliki pengalaman luas di bidang pertanian, kebutuhan ekonomi mendorong transmigran untuk mengambil kesempatan bertransmigrasi, seperti yang diamati di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lumajang dalam penelitian ini.

## 3. Karakteristik Psikologis Calon Transmigran

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar calon transmigran memiliki pekerjaan yang tidak tetap, yang menyebabkan kekhawatiran terutama terkait masa depan anak-anak transmigran daripada tingkat kehidupan di daerah asal. Meskipun demikian, minat untuk bertransmigrasi meningkat karena menjanjikan perumahan, pangan, dan jaminan hidup dari pemerintah selama masa pendampingan, yang dianggap cukup menarik bagi sebagian masyarakat.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa mayoritas calon transmigran memiliki motivasi kuat untuk meningkatkan taraf

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

hidup transmigran di lokasi baru, bukan hanya mempertahankan hidup dari hari ke hari di daerah asal. Transmigran memiliki semangat untuk berusaha di sektor pertanian dan bermaksud menetap secara permanen di daerah tujuan transmigrasi.

Sebagian besar calon transmigran juga mengungkapkan bahwa kepemilikan tanah dan jaminan masa depan anak-anak transmigran merupakan motivasi utama untuk bertransmigrasi. Memiliki tanah tidak hanya memberikan jaminan kebutuhan pokok keluarga dan pendapatan tetap, tetapi juga meningkatkan status sosial transmigran dalam masyarakat. Motivasi lainnya termasuk peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah baru, yang dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga transmigran.

#### 4. Karakteristik Sosial Budaya

Dalam konteks pendaftaran transmigrasi di Jawa Timur, mayoritas calon transmigran berasal dari suku Jawa dan Madura, namun terdapat kecenderungan meningkatnya keragaman asal daerah transmigran. Data yang diperoleh dari catatan pemerintah provinsi atau kabupaten asal memberikan gambaran bahwa suku asal transmigran dapat diperkirakan. Contohnya, Kabupaten Pacitan menunjukkan dominasi suku Jawa dalam jumlah pendaftar transmigrasi, sedangkan Kabupaten Lumajang melibatkan baik suku Jawa maupun Madura dalam jumlah yang signifikan.

Aspek penting dalam analisis sosio-grafis terhadap calon transmigran adalah pendidikan dan keterampilan yang transmigran miliki. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas kepala keluarga calon transmigran di Kabupaten Lumajang dan Pacitan memiliki latar belakang pendidikan menengah seperti SMA dan SMP. Menariknya, sebagian calon transmigran dari Kabupaten Pacitan juga memiliki latar belakang pendidikan tinggi seperti Sarjana (S1), menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia transmigran cukup beragam. Hal ini menekankan pentingnya pendidikan dan

keterampilan sebagai faktor kunci dalam seleksi calon transmigran.

Studi ini mengungkapkan bahwa meskipun program transmigrasi di Jawa Timur melibatkan berbagai daerah asal, dominasi suku tertentu dan variasi tingkat pendidikan tetap mempengaruhi dinamika proses transmigrasi. Lebih lanjut, pemahaman mendalam tentang pola migrasi, pendidikan, dan keterampilan calon transmigran dapat membantu dalam pengembangan kebijakan transmigrasi yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

#### 5. Pilihan Lokasi Transmigrasi

Jika data pilihan lokasi dapat digunakan untuk melihat penerimaan penduduk asal, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas calon transmigran lebih memilih Kalimantan dan Sumatera sebagai lokasi transmigrasi yang diinginkan. Beberapa calon transmigran lebih suka Sulawesi, dan lainnya memiliki preferensi yang lebih luas. Pilihan lokasi ini tentu saja harus disesuaikan dengan pemohon di 'daerah pengirim' yang kemudian dicocokkan dengan permintaan dari 'daerah penerima'.

Preferensi ini muncul karena sebagian besar calon transmigran berpandangan bahwa Sumatera memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dari Jawa, sementara minat pada Kalimantan dipengaruhi oleh sejarah program transmigrasi sebelumnya yang transmigran pahami dan banyaknya anggota keluarga yang sebelumnya sudah bekerja dan bahkan telah menetap disana. Faktor familiaritas lingkungan dengan Pulau Jawa juga mempengaruhi preferensi para calon transmigran tersebut. Namun, tantangan muncul jika calon transmigran diarahkan ke lokasi yang tidak sesuai preferensi yaitu pengunduran diri dengan atau alasan lain. Banyak calon transmigran memiliki pengalaman bekerja di luar negeri atau di luar pulau seperti Kalimantan dan Sulawesi, pengalaman ini menguatkan keinginan transmigran terkait tujuan transmigrasi.

## C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi calon transmigran masih rendah, khususnya dalam hal keterampilan pertanian dan pemahaman terhadap prospek usaha ekonomi di daerah tujuan transmigrasi. Diperlukan peningkatan data potensi calon transmigran, terutama terkait dengan profil sosial ekonomi tingkat desa, yang harus diintegrasikan dengan data kemiskinan baik dari Kementerian Sosial dan pemerintah daerah.

Rendahnya potensi calon transmigran juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang tujuan dan peluang usaha di lokasi tujuan transmigrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif, mencakup informasi mengenai persyaratan, jenis transmigrasi, prosedur dan seleksi, serta hak dan kewajiban di daerah tujuan agar calon transmigran termotivasi dan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Pengetahuan dan preferensi mengenai lokasi tujuan transmigrasi juga merupakan ukuran keberhasilan program ini. Temuan dari penelitian ini menyarankan beberapa rekomendasi untuk pengembangan program transmigrasi. Pertama, sebagai bagian integral dari kebijakan sosial pengentasan kemiskinan, program transmigrasi memerlukan dukungan yang kuat baik dalam perencanaan maupun alokasi anggaran yang memadai. Kedua, penting untuk meningkatkan pengumpulan data potensi calon transmigran, terutama terkait karakteristik sosial ekonomi transmigran, yang harus diintegrasikan dengan informasi kemiskinan dan potensi dampak bencana dari pemerintah.

## REFERENSI

Burbridge, P., Dixon, J. A., & Soewardi, B. (1981). Forestry and agriculture: Options for resource allocation in choosing lands for transmigration development. *Applied Geography*, 1(4), 237–258. [https://doi.org/10.1016/0143-6228\(81\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0143-6228(81)90010-2)

- Chotib. (2011). Minat Bertransmigrasi Penghuni Bantaran Sungai dan Banjir Kanal Timur DKI Jakarta. *Jurnal Ketramigrasian*, 28(1 Juli), 25–33.
- Delam, J. (2011). Kajian Regulasi Penyediaan Tanah untuk Pemukiman Transmigrasi. *Jurnal Ketramigrasian*, 28(2), 5565.
- Dewi, R. N. (2011). Kajian Karakteristik Calon Transmigrasi di Kabupaten Boyolali Untuk Penempatan Transmigrasi. *Jurnal Ketramigrasian*, 28(2), 103–112.
- Dewi, R. N. (2013). *Minat Penduduk Korban Bencana Merapi Untuk Bertransmigrasi*. Lembar Abstraksi (Current Content), 30(2), 145–155.
- Gede, N. I., & Ketut, S. I. (2013). Menggalakkan Program Transmigrasi Melalui Peningkatan Pembangunan Daerah. *Piramida*, 9(1), 50–56.
- Hardiyanti, M., Utami, Y. R. W., & Saptomo, W. L. Y. (2018). Pemetaan Daerah Berpotensi Transmigran Di Kecamatan Kartasura Dengan Metode Fuzzy C-Means (FCM) Clustering. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKOMSiN)*, 6(1). <https://doi.org/10.30646/tikomsin.v6i1.347>
- Keyfitz, N., & Nitisastro, W. (1964). *Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia*. Pembangunan.
- Knight, G. R. (1994). *Indonesia - In the Shadow of Agriculture: Non-farm Activities in the Javanese Economy, Past and Present*. Edited by Paul Alexander, Peter Boomgaard and Ben White. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1991. Pp. 154. Tables, Notes, Bibliographies, Index. *Journal of Southeast Asian Studies*, 25(1), 188–192. <https://doi.org/10.1017/S0022463400006810>
- Muhsin, I. (2023). Local Government Capacity in Transmigration Development, Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(2), 313–325.

- <https://doi.org/10.52728/ijss.v4i2.736>
- Najiyati, S., & Susilo, S. R. T. (2011). Sinergitas instansi pemerintah dalam pembangunan Kota Terpadu Mandiri. *Jurnal ketrasmigrasian*, 28(2), 113–124.
- Pargito. (2020). Social migration and environmental change in Lampung Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 485(1), 012040. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/485/1/012040>
- Potter, L. (2012). New transmigration “paradigm” in Indonesia: Examples from Kalimantan. *Asia Pacific Viewpoint*, 53(3), 272–287. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2012.01492.x>
- Saksono, H. (2011). Kajian Peran Strategis Transmigrasi dalam Implementasi MP3EI. *Jurnal Ketrasmigrasian*, 28(2 Desember), 67–77.
- Suharso, S., & Dalijo, S. (1981). *Transmigran dan Latar Belakangnya*. Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Susilowati, S. H. (2016). Fenomena Penuaan Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda serta Implikasinya bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian. *Forum penelitian Agro Ekonomi*, 34(1), 35. <https://doi.org/10.21082/fae.v34n1.2016.35-55>
- Sutanto, S. H., Aruan, N., & HT, M. A. (2019). Evaluation of Success of Transmigration East Java In Unit Permukiman Transmigran Tanjung Buka SP.3 Bulungan District, North Kalimantan Province. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 199–220. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.399>
- Warganegara, A., & Waley, P. (2022). The political legacies of transmigration and the dynamics of ethnic politics: A case study from Lampung, Indonesia. *Asian Ethnicity*, 23(4), 676–696. <https://doi.org/10.1080/14631369.2021.1889356>